

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU),
Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap
Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019.**

Nursita Wulandari Lutpikah¹, Denny Mahendra²

STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta

Email: nursitawulandarihutpikah@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pada kabupaten kota karanganyar tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis dalam penelitian ini terdiri dari uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R². Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Nilai F signifikansi sebesar 0.000. Adjusted R Square menunjukkan bahwa Belanja Modal dipengaruhi sebesar 50.9% oleh variabel independen sedangkan sisanya 49.1% dipengaruhi oleh variabel atau model lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata kunci : Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of regional own-source revenues, general allocation funds, special allocation funds, and revenue-sharing funds on capital expenditure in the karanganyar city in 2017-2019. The sampling technique uses purposive sampling technique. The analysis technique in this study consisted of the classic assumption test, multiple linear regression analysis test, t test, F test, R² test. The result of this study indicate that the regional revenue has a positive but not significant effect on capital expenditure, general allocation funds have a negative and significant effect on capital expenditures, special allocation funds have a negative and not significant effect on capital expenditures and profit sharing funds have a negative and not significant effect on expenditure capital. The F value of significance is 0,000. Adjusted R square shows that capital expenditure is influenced by 50.9% by independent variabel while the remaining 49.1% is influenced by other variables or model not included in this study.

Keywords: capital expenditure, regional original revenue, general allocation fund, special allocation fund, and revenue sharing fund

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata. Materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Maka dari itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan guna menunjang keberhasilan pembangunan. Untuk meratakan pembangunan ini maka pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah. Kebijakan ini berlaku di Indonesia berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan UU Nomor 25 tahun 1999) tentang pemerintah daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan perwakilan rakyat daerah (legislatif), memberikan kewenangan bebas kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahannya sendiri dan seminimal mungkin campur tangan dengan pemerintah pusat. Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif mempunyai hubungan Keagenan (Halim,2001; Halim & Abdullah, 2006).

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintahan pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah berhasil. Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari dana Bagi Hasil Bersumber dari Pajak dan Dana Bagi Hasil Bersumber dari Alam. (Darise,2007:38). Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai segala kegiatannya, kali ini menimbulkan kesimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini. Pemerintahan mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintahan ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan adanya tranfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah biasa lebih mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di dapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu faktor yang menunjang kemandirian suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila Pendapatan Asli Daerah berjumlah besar dan tingkat ketergantungan akan pemerintah pusat semakin rendah. Sebaliknya, apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah rendah maka ketergantungan kepada pemerintah pusat akan semakin tinggi. Penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat dan daerah yang otonom dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro,2004). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktifitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Menurut Edy Meianto dkk (2014) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. menurut rachim dkk (2017) Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Menurut juniawan dkk (2018) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Menurut galih putranto (2014) Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Karanganyar”.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data sekunder,dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan *purposive sampling*. Sumber data diperoleh dari data realisasi Kabupaten/Kota Karanganyar. Populasi dalam penelitian ini (n) sebanyak 36. Alat analisis yang dipergunakan adalah analisis linier berganda. Teknik analisa data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji f, uji t dan analisis koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji statistic deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	36	16935596647	84518397880	31835056827	11711278871
DAU	36	0	167978000000	81238981597	34807333569
DAK	36	0	93909977950	24228354520	29624949014
DBH	36	0	9396738450	2996392828	3014918039,1
Belanja Modal	36	0	148020000000	22799758116	36693567304
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2020

- a. Variabel Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar Rp.0, nilai maksimum sebesar Rp.148.020.000.000,000 nilai rata-rata sebesar Rp.22.799.758.116 dan nilai standar deviation sebesar Rp.36.693.567.304.
 - b. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp.16.935.596.647, nilai maksimum sebesar Rp.84.518.397.880, nilai rata-rata sebesar Rp. 31.835.056.827, dan standar deviation sebesar Rp.11.711.278.871.
 - c. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar Rp.0, nilai maksimum sebesar Rp.167.978.000.000, nilai rata rata sebesar Rp.81.238.981.597, dan standar deviation sebesar Rp.34.807.333.569.
 - d. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar Rp.0, nilai maksimum sebesar Rp. 93.909.977.950, nilai rata-rata sebesar Rp.24.228.354.520, dan standar deviation sebesar Rp. 29.624.949.014.
 - e. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai minimum sebesar Rp.0, nilai maksimum Rp. 9.396.738.450, nilai rata-rata Rp.2.996.392.828, dan nilai standar deviation Rp.3.014.918.039,1.
2. Uji Asumsi Klasik
- a. Hasil uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000110
	Std. Deviation		24208822361
Most Extreme Differences	Absolute		,191
	Positive		,191
	Negative		-,103
Kolmogorov-Smirnov Z			1,148
Asymp. Sig. (2-tailed)			,144

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.2 terdapat hasil *Asymp.sig (2-tailed)* sebesar $0.144 > (0,05)$, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients

Mod.		Standardized Coefficients		Beta	t	Sig.	Linearity Statistics	
		B	Std. Error				Collinearity	VIF
1	(Const)	.842	.0297	.630	276,7	4,004	,000	
	PAD	,034	,424	,011	,080	,937	,767	1,304
	DAU	-,815	,146	-,773	-5,593	,000	,735	1,361
	DAK	-,070	,156	-,056	-,446	,659	,885	1,129
	DBH	-1,301	1,482	-,107	-,878	,387	,948	1,055

^aDependent Variable: Belanja Modal

Sumber : data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.3 bahwa dalam pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance pendapatan asli daerah (PAD) sebesar (0,767), dana alokasi umum (DAU) sebesar (0,735), dana alokasi khusus (DAK) sebesar (0,885), dana bagi hasil (DBH) sebesar (0,948). Nilai VIF pendapatan asli daerah (PAD) sebesar (1,304), dana alokasi umum (DAU) sebesar (1,361), dana alokasi khusus (DAK) sebesar (1,129), dan dana bagi hasil (DBH) sebesar (1,055). Hasil dari perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance dari keempat variabel diatas $> 0,10$ dan nilai VIF dari keempat variabel diatas < 10 . Maka dapat dikatakan dalam model regresi ini tidak ada multikolinearitas antar variabel independent.

c. Hasil heterokedastisitas

Coefficients

Mod.		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficient	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Const)	1,775E+021	3486752000000		2,069	,047
	PAD	025099969,485	570687426,318	-,037	-,194	,847
	DAU	03217285,491	353489597,917	-,358	-1,831	,077
	DAK	858592447,012	5729293849,312	-,151	-,848	,403
	DBH	155283731,908	4419229700,625	-,206	-1,197	,240

^aDependent Variable: Absut

Sumber : data yang diolah 2020

Berdasarkan tabel IV.4 didapatkan bahwa nilai signifikansi dari kelima variabel lebih besar dari (0,05), jadi dapat disimpulkan data pada penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Hasil uji autokorelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.751 ^a	.565	.509	25723309252	1,310

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAK, DAU
 b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : data yang diolah, 2020

Berdasarkan Analisa data diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai durbin-watson sebesar 1,310, dimana hasilnya menunjukan diantara (-2) dan (2). Hasil tersebut menunjukan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel.

Hasil uji Regresi linier berganda

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	93528420297	23358630276,7		4,004	,000		
	PAD	,034	,424	,011	,080	,937	,767	1,304
	DAU	-,815	,146	-,773	-5,593	,000	,735	1,361
	DAK	-,070	,156	-,056	-,446	,659	,885	1,129
	DBH	-1,301	1,482	-,107	-,878	,387	,948	1,055

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data yang diolah,2020 $Y=\alpha+\beta_1X_1+ \beta_2X_2+ \beta_3X_3+ \beta_4X_4+ \epsilon$

$$Y= 93528420297 + 0,034X_1 + (-0,815)X_2 + (-0,070)X_3 + (-1,301)X_4 + \epsilon$$

- 1) Hasil dari regresi linier di atas menunjukkan bahwa koefisien konstanta menunjukkan angka positif yakni sebesar 93528420297 dengan demikian dapat di artikan bahwa belanja modal akan bernilai sebesar 93528420297 apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai nilai konstan.
- 2) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien konstanta regresi dari pendapatan asli daerah sebesar 0,034 dengan nilai positif, dapat dikatakan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka belanja modal akan mengalami kenaikan pula sebesar 0,034 juta rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 3) Koefisien konstanta regresi dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar -0,815 menunjukkan hasil negatif dapat dikatakan bahwa, apabila dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka belanja modal akan mengalami penurunan sebesar -0,815 rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.
- 4) Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan koefisien konstanta regresi sebesar -070 dengan nilai negatif , dapat dikatakan apabila dana alokasi khusus mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka belanja modal akan mengalami penurunan sebesar -070 rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.

- 5) Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan hasil sebesar -1,301 dengan nilai negatif. Dapat dikatakan apabila dana bagi hasil mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka belanja modal akan mengalami penurunan sebesar -1,301 rupiah, dengan asumsi variabel lain tetap.

Hasil Uji F

ANOVA

Mod		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regres	735410000000	4	933850000000	0,055	,000 ^a
	Residu	541110000000	31	56164000000,0		
	Total	276500000000	35			

^aPredictors: (Constant), DBH, PAD, DAK, DAU

^bDependent Variable: Belanja Modal

Sumber: data yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel IV.7 nilai F hitung sebesar 10,055 dan signifikasi sebesar $0,000 < 0,05$. jadi dapat disimpulkan bahwa secara bersama sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1	(Constant)	93528420297	23358630276,7			4,004	,000		
	PAD	,034	,424	,011	,080	,937	,767	1,304	
	DAU	-,815	,146	-,773	-5,593	,000	,735	1,361	
	DAK	-,070	,156	-,056	-,446	,659	,885	1,129	
	DBH	-1,301	1,482	-,107	-,878	,387	,948	1,055	

^a . Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : data yang diolah, 2020

Berdasarkan dari hasil uji t pada tabel IV 8 tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- 1). Variabel pendapatan asli daerah pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,937 dimana dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai sig > α yakni ($0,937 > 0,05$), berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi pendapatan asli daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal.
- 2). Variabel dana alokasi umum pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,000 dimana dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai sig > α yakni ($0,000 > 0,05$), berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
- 3). Variabel dana alokasi khusus pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi sebesar 0,659 dimana hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai sig > α yakni ($0,659 > 0,05$), berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dana alokasi khusus berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal.

4). Variabel dana bagi hasil pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,367 dimana dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa nilai $\text{sig} > \alpha$ yakni ($0,367 > 0,05$), berarti H_0 diterima dan H_a di tolak. Jadi dana bagi hasil berpengaruh positif akan tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal.

Hasil Uji R^2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,751 ^a	,565	,509	25723309252	1,310

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAK, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel IV.9 bahwa besarnya adjusted R Square (R^2) adalah 0,509 atau 50,9 %, dari hasil ini menunjukkan bahwa belanja modal dipengaruhi sebesar 50,9 % oleh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil), sedangkan sisanya 49,9 % ($100 \% - 50,9 \%$) dijelaskan oleh variabel lain tidak ada dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

1. Hasil pengujian dari penelitian ini membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Karanganyar dengan koefisien regresi positif sebesar 0,034 dan nilai signifikansi $0,937 > 0,05$. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya. Pendapatan asli daerah digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah untuk memperkecil ketergantungan dengan pemerintah pusat. Meningkatnya pendapatan asli daerah maka pemerintah daerah dapat menyusun anggaran belanja dengan mudah salah satunya adalah belanja modal. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pengaruh pendapatan asli daerah yang tidak signifikan terhadap belanja modal karena dana yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang masih relatif kecil. alasan lain pengaruh pendapatan asli daerah tidak signifikan (bukan faktor penentu) terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota karanganyar adalah adanya masalah keagenan. Dimana pihak eksekutif

yaitu pemerintah daerah mengajukan anggaran untuk disetujui oleh pihak legislatif. Hal ini senantiasa terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penentuan target pendapatan dan pengelolaan sumber daya dalam belanja daerah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sandi yabsa (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

2. Hasil pengujian dari penelitian ini membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif namun signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota Karanganyar dengan koefisien regresi negatif sebesar $-0,815$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Dana alokasi umum merupakan salah satu dana transfer dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi, serta pemerintah daerah dapat digunakan untuk pelaksanaan fungsi layanan dasar umum dan dana yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hasil ini menjelaskan bahwa dana alokasi umum yang besar akan cenderung memiliki belanja modal rendah. Hal ini terjadi karena dana alokasi umum digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja lainnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Arbie Gugus Wandira yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh DAK Terhadap Belanja Modal

3. Hasil pengujian dari penelitian ini membuktikan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota Karanganyar dengan koefisien regresi negatif $-0,070$ dan nilai signifikansi $0,659 > 0,05$. Dana alokasi khusus berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah. Peningkatan dana alokasi khusus dapat meningkatkan pula belanja modal. Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan nilai koefisien regresi negatif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal. Dengan kata lain, peningkatan dana alokasi khusus jumlah yang diterima oleh pemerintah daerah selama periode tersebut tidak seiring dengan peningkatan belanja modal. Pengaruh dana alokasi khusus yang tidak signifikan terhadap belanja modal karena pengelolaan dana alokasi khusus yang kurang maksimal, sehingga menyebabkan dana alokasi khusus tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Galih Putranto (2014), menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

4. Hasil pengujian dari penelitian ini membuktikan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif akan tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota Karanganyar. Dengan koefisien regresi negative sebesar -1,301 dan nilai signifikansi sebesar 0,367. . Alasan mengapa dana bagi hasil tidak signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah kota kabupaten Karanganyar adalah adanya masalah keagenan. Dimana pihak eksekutif yaitu pemerintah daerah mengajukan anggaran untuk disetujui oleh pihak legislatif. Hal ini senantiasa terjadi dalam pengelolaan daerah, khususnya dalam proses penentuan target pendapatan dan pengelolaan sumber daya dalam belanja daerah

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis dari data yang dilakukan dalam penelitian ini maka penelitian dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

Hasil uji hipotesis membuktikan

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
- d. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Faktor yang dominan berpengaruh terhadap Belanja Modal adalah Dana Bagi Hasil dimana dalam uji regresi linier berganda menunjukkan angka Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar (1,301).

Pada model summary diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 0,509, hal ini menunjukkan bahwa belanja modal dipengaruhi sebesar 50,9% oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan sisanya 49,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Keterbatasan Penelitian

1. Dalam penelitian ini objek penelitian hanya pada Kabupaten/Kota Karanganyar.
2. Dalam penelitian ini rentang yang digunakan hanya tiga tahun yaitu 2017-2019.

-
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah empat variabel yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH), sehingga nilai koefisien determinasinya sebesar 50,9%, sehingga masih terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi Belanja Modal.

Saran

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengkaji potensi-potensi yang ada semisal potensi dibidang pariwisata. Melalui pariwisata maka pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi karcis dan parkir akan meningkat, maka dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan mengalami peningkatan.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan dana alokasi umum yang merupakan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola dan memanfaatkan sana alokasi khusus dengan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat mampu memanfaatkan Dana Bagi Hasil dengan sebaik-baiknya karena Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang berpotensi dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah salah satunya adalah belanja modal. Dengan meningkatkan Pajak Bumi dan bangunan serta pajak orang pribadi mampu menambah Dana Bagi Hasil dari tiap daerah.
5. Penelitian yang akan datang diharap kan dapat menambah atau memperbarui periode penelitian, dan menambah jumlah variabel penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbie Gugus Wandira. (2013). *Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal.*
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari.(2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.* Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Edy Meianto, Betri dan Cherrya,Dhia,Wenny. *Pengaruh Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan.*
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS).

Santika, Adhi, Karyadi dan Abdullah, Taman. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Tahun 2011-2014.*

Sri Ayem dan Dessy, Dyah, Pratama. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016.* Akuntansi Derwantara Vol: 2. No. 2.

Syaiful. 2006. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan,* Artikel.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.